

Determinan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Provinsi Jawa Tengah

Determinants of Inclusive Economic Growth in Central Java Province

Reza Lukiawan¹, Sri Mulatsih², Deniey Adi Purwanto²

¹Badan Riset dan Inovasi Nasional

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 12710, Jakarta, Indonesia

²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University

Jl. Agatis IPB Darmaga, Bogor 16680, Jawa Barat, Indonesia

*Correspondence: rezalukiawan@apps.ipb.ac.id

[diterima 21-06-2025; revisi 18-05-2026; diterbitkan 31-07-2026]

ABSTRAK

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2018-2024 mengalami peningkatan, namun indeks gini menunjukkan ketimpangan sedang dan cenderung meningkat. Penelitian ini bertujuan menganalisis inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif. Analisis menggunakan model regresi First Difference Generalized Method of Moments (FD-GMM) dan Fixed Effect Model. Unit analisis adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode 2021-2024. Data diperoleh dari BPS dan Bapenas. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tidak inklusif dilihat dari indikator kemiskinan maupun ketimpangan, namun dalam menyerap tenaga kerja telah inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan kemiskinan dipengaruhi oleh inklusivitas pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, pendapatan per kapita, angka partisipasi sekolah dan investasi. Sementara pertumbuhan ekonomi inklusif dalam penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh inklusivitas pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, tingkat upah, PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan ketimpangan dipengaruhi oleh investasi, pendapatan per kapita dan angka partisipasi sekolah. Untuk meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah, memperbaiki iklim investasi dan tingkat upah.

Kata kunci: data panel, kemiskinan, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi inklusif, penyerapan tenaga kerja

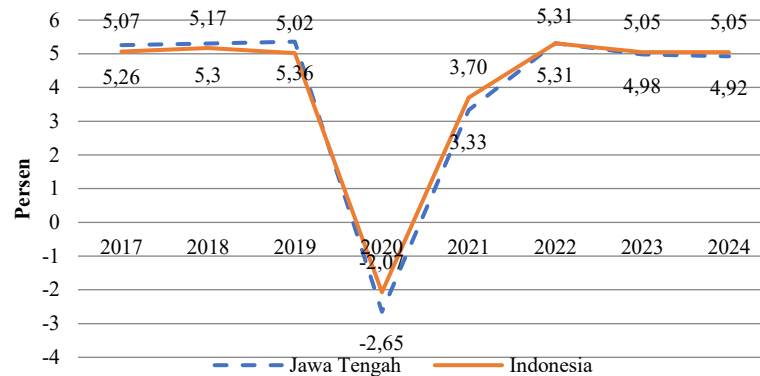
ABSTRACT

The economy of Central Java Province experienced growth between 2018 and 2024, but the Gini index shows moderate inequality and an increasing trend. This study aims to analyze the inclusiveness of economic growth in Central Java and the factors influencing inclusive economic growth. The analysis uses the First Difference Generalized Method of Moments (FD-GMM) regression model and the Fixed Effect Model. The unit of analysis is 35 regencies/cities in Central Java during the 2021-2024 period. Data were obtained from BPS and Bappenas. The results show that economic growth in Central Java Province is not yet inclusive as seen from poverty and inequality indicators, but in labor absorption it is inclusive. Inclusive economic growth in reducing poverty is influenced by the inclusiveness of economic growth in the previous year, per capita income, school enrollment rates, and investment. Meanwhile, inclusive economic growth in absorbing labor is influenced by the inclusiveness of economic growth in the previous year, wage levels, GDP, and labor absorption. Meanwhile, inclusive economic growth in reducing inequality is influenced by investment, per capita income, and school enrollment rates. To increase the inclusiveness of economic growth, local governments need to focus on increasing school enrollment rates, improving investment climate and wage levels.

Keywords: inclusive economic growth, inequality, labor absorption, panel data, poverty

JEL classification:

PENDAHULUAN



Sumber: BPS, 2024

Gambar 1. Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia

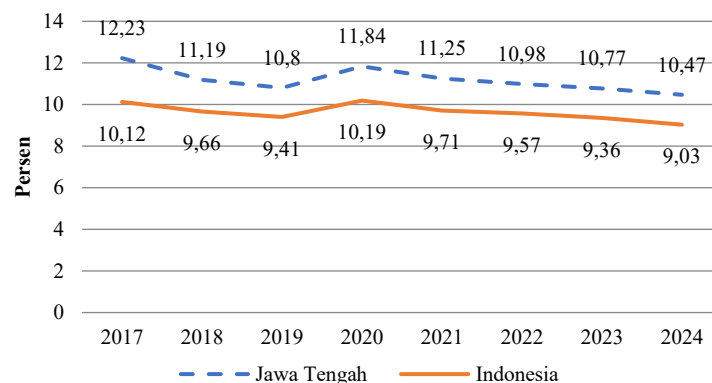
Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output per kapita yang berdampak pada meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat (Hartati 2021). Indikator keberhasilan pembangunan daerah salah satunya diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, ukuran lainnya adalah kemampuan daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk kemampuan menekan kesenjangan antar golongan (Hapsari 2019).

Kesenjangan antar golongan bisa ditekan hanya jika pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif, di mana semua pihak turut andil atau berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan ketimpangan dan pengangguran, mampu memberikan manfaat pemerataan dan kesejahteraan kepada seluruh penduduk (Sitorus dan Marsinta 2016, Prasetyantoko et al. 2012, Klasen 2010).

Indikator inklusivitas pembangunan ekonomi di Indonesia sudah dirumuskan oleh Bappenas

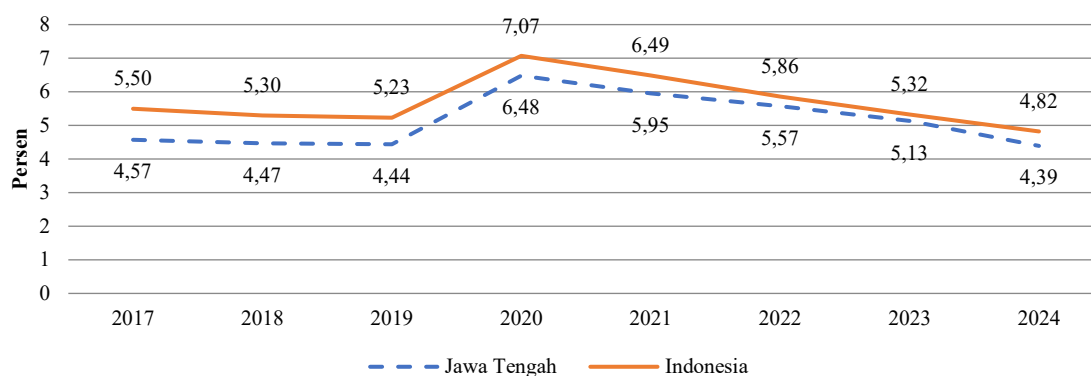
melalui tiga pilar, yakni: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan (Bappenas 2020). Dari ketiga pilar tersebut masih, pilar 1 capaian kinerjanya paling rendah yaitu dengan indeks 5,29 (dari skala nilai 0-10), dibawah indeks pilar 2 (6,57) dan pilar 3 (7,06). Oleh sebab itu kinerja pilar 1 yaitu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan ketersediaan infrastruktur ekonomi, perlu mendapat perhatian utama untuk meningkatkan inklusivitas pembangunan di Indonesia.

Salah satu provinsi yang kinerja pilar 1 perlu ditingkatkan adalah Provinsi Jawa Tengah. Selama periode 2017- 2021, rata-rata indeks pilar 1 Jawa Tengah sebesar 5,52, jauh dibawah DKI Jakarta yang mencapai 7,63. Perekonomian Jawa Tengah dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pada periode 2021-2024 mengalami pertumbuhan hingga 4,92%, meskipun sempat mengalami pertumbuhan negatif (-2,65%) pada pandemi COVID-19 tahun 2020.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 3. Perbandingan Persentase Pengangguran Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia

Sementara itu, Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah tergolong tinggi dibandingkan dengan nasional, meskipun cenderung menurun pada periode tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 Persentase penduduk miskin mencapai 11,84% kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga mencapai 10,47% pada tahun 2024.

Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah sedikit lebih rendah dibandingkan nasional. Namun masih fluktuatif, yang menunjukkan ada masa-masa di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja.

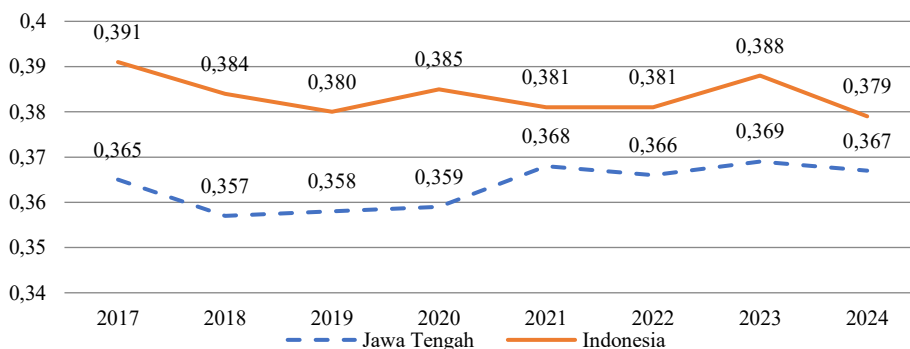
Demikian juga dengan ketimpangan pendapatan. Indeks gini pendapatan di Jawa Tengah tergolong ketimpangan sedang namun memiliki tren yang meningkat. Pada tahun 2020 nilai indeks gini hanya sebesar 0,359 kemudian pada tahun-tahun berikutnya mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2024 menjadi 0,367.

Pertanyaannya adalah, apakah pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Provinsi Jawa Tengah termasuk kategori inklusif? Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi

inklusif? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat inklusivitas pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang meliputi 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Jenis data yang digunakan adalah data panel. Periode waktu yang digunakan 2018-2024 untuk mengukur inklusivitas dan data 2021-2024 untuk menyusun model ekonometrik. Perbedaan periode waktu analisis dikarenakan BPS secara resmi tidak merilis indeks gini tahun 2018-2020. Data yang digunakan yaitu jumlah penduduk miskin, PDRB ADHK (2010), PDRB per kapita ADHK (2010), gini rasio, jumlah angkatan kerja, Angka Partisipasi Sekolah, Realisasi Belanja Daerah, nilai investasi, kontribusi sektor pertanian, kontribusi sektor industri pengolahan, jumlah penduduk, upah minimum, jumlah pengangguran.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 4. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia

Variabel penelitian diadaptasi dari penelitian terkait pertumbuhan inklusif dari peneliti sebelumnya yaitu Sholihah et al. (2018), Prabandari et al. (2018), Oluseye et al. (2017), Zulfiaa et al. (2024), Bustinza et al. (2023), Habeenzu (2024), Ahsan et al. (2024) dan Sajid et al. (2018).

Sumber data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dan kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah apakah telah inklusif atau tidak yaitu dengan pengukuran dengan rumus pertumbuhan inklusif diadopsi dari konsep Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR). Sedangkan analisis kuantitatif menggunakan metode regresi data panel dinamis dengan FD-GMM.

Pengukuran pertumbuhan yang inklusif mengadopsi konsep dari PEGR di mana rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$IG_{ij} = (E_{ij}/E_i) E_j$$

Di mana:

IG_{ij} : koefisien pertumbuhan inklusif

E_{ij} : pertumbuhan kelompok i dalam kaitannya dengan indikator j

E_i : pertumbuhan kelompok i

E_j : pertumbuhan indikator j

Dalam hal ini i mengacu pada kelompok kurang beruntung tertentu dan j mengacu pada indikator yang bersangkutan.

Sesuai dengan konsep pertumbuhan inklusif yang terdiri dari tiga indikator yaitu kemiskinan, ketimpangan dan penyerapan tenaga kerja, maka ketiga indikator dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- 1) Inklusivitas dalam Menurunkan Kemiskinan
 $IG_p = (E_{pg}/E_p) \cdot G_g$
- 2) Inklusivitas dalam Menurunkan Ketimpangan
 $IG_{in} = (E_{ing}/E_{in}) \cdot G_g$
- 3) Inklusivitas dalam Penyerapan Tenaga Kerja

$$IG_{em} = (E_{emg}/E_{em}) \cdot G_g$$

Di mana:

- IG_p : Inklusivitas dalam menurunkan kemiskinan
- E_{pg} : Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi
- E_p : Elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata
- IG_{in} : Inklusivitas dalam menurunkan ketimpangan
- E_{ing} : Elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi
- E_{in} : Elastisitas ketimpangan terhadap pendapatan rata-rata
- IG_{em} : Inklusivitas dalam penyerapan tenaga kerja
- E_{emg} : Elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi
- E_{em} : Elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pendapatan rata-rata
- G_g : Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan dinyatakan inklusif apabila nilai $IG_p, IG_{in}, IG_{em} > G_g$.

Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi diturunkan melalui rumus berikut ini (cara yang sama untuk menurunkan elastisitas penyerapan tenaga kerja dan elastisitas ketimpangan):

- Kemiskinan (P) fungsi dari jumlah penduduk miskin (z) dan pendapatan rata-rata (κ):
 $P = P(z, \kappa)$
- Perubahan persentase jumlah penduduk miskin pada periode 1 dan periode 2:
 $P12 = P2 - P1 = \ln [P(z2, \kappa2)] - \ln [P(z1, \kappa1)]$
- Perubahan pendapatan rata-rata penduduk:
 $\Psi = \ln(\kappa2) - \ln(\kappa1)$
- Elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata (E_p):
 $E_p = P12 / \Psi$
- Pertumbuhan ekonomi (G_g):
 $G_g = \ln(PDRB2) - \ln(PDRB1)$
- Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi (E_{pg}):
 $E_{pg} = P12 / G_g$

Metode yang digunakan dalam regresi data panel dinamis pada penelitian ini yaitu *Generalized Method of Moments* (GMM) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif di provinsi Jawa Tengah. Sementara itu jenis analisis panel dinamis yang dipilih yaitu *first difference* (FD-GMM) atau *Arellano-bond* (AB-GMM).

Penelitian ini menggunakan tiga model untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif antara lain:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan

$$IGp_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 IGp_{it-1} + \alpha_2 \log PDP_{it} + \alpha_3 \log APS_{it} + \alpha_4 \log BLJ_{it} + e_{it}$$

2. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif dalam menyerap tenaga kerja

$$IGem_{it} = \beta_0 + \beta_1 IGE_{it-1} + \beta_2 \log UPAH_{it} + \beta_3 \log PDRB_{it} + \beta_4 \log UNEM_{it} + e_{it}$$

3. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan

$$IGin_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 \log INV_{it} + \gamma_2 \log PDP_{it} + \gamma_3 \log APS_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

IGp_{it}	: Inklusivitas dalam menurunkan kemiskinan di kabupaten/kota i pada tahun t
IGp_{it-1}	: Inklusivitas dalam menurunkan kemiskinan di kabupaten/kota i pada tahun sebelumnya
$IGem_{it}$	: Inklusivitas dalam penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota i pada tahun t
$IGem_{it-1}$	: Inklusivitas dalam penyerapan tenaga di kabupaten/kota i pada tahun sebelumnya
$IGin_{it}$	: Inklusivitas dalam menurunkan ketimpangan di kabupaten/kota i pada tahun t
$IGin_{it-1}$	: Inklusivitas dalam menurunkan ketimpangan di kabupaten/kota i pada tahun sebelumnya

PDP	: Pendapatan per kapita
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
BLJ	: Belanja Daerah
UPH	: Tingkat Upah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
UNEM	: Jumlah pengangguran
I	: Kabupaten/Kota
t	: tahun
$\alpha_0, \beta_0, \gamma_0$	: Intersep
$\alpha_1, \dots, \alpha_n$	: Koefisien regresi (i=1,2,3,...n)
$\beta_1, \dots, \beta_n$	: Koefisien regresi (i=1,2,3,...n)
$\gamma_1, \dots, \gamma_n$	: Koefisien regresi (i=1,2,3,...n)
eit	: error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi

Pada penelitian ini untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang inklusif digunakan tiga indikator, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi (Gg) yang mampu menurunkan kemiskinan (IGp); (2) Pertumbuhan ekonomi (Gg) yang mampu mengurangi ketimpangan (IGin), dan (3) Pertumbuhan ekonomi (Gg) yang dapat menyerap tenaga kerja (IGem). Suatu pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan inklusif bila koefisien pertumbuhan terhadap indikator yang diukur yaitu penurunan kemiskinan (IGp), pengurangan ketimpangan (IGin) dan penyerapan tenaga kerja (IGem) memiliki nilai yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi (Gg), dan bernilai positif.

Hasil perbandingan nilai inklusivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan (IGp), mengurangi ketimpangan (IGin), dan menyerap tenaga kerja (IGem) dengan pertumbuhan ekonomi (Gg) yang dilihat dari perubahan PDRB, pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2024 ditunjukkan pada Tabel 1, 2 dan 3.

Pada Tabel 2, terdapat beberapa nilai yang tidak teridentifikasi (hasil perhitungan error karena indeks gini tidak mengalami perubahan dibanding periode sebelumnya, sehingga pembagiannya angka nol (tidak terdefinisi) dan diberi nilai NA.

Tabel 1. Perbandingan Koefisien Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2024

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2018		2020		2022		2024	
	IGp	Gg	IGp	Gg	IGp	Gg	IGp	Gg
Kabupaten Cilacap	0,025	0,030	-0,205	-0,103	0,041	0,051	0,017	0,027
Kabupaten Banyumas	0,055	0,065	-0,065	-0,017	0,048	0,059	0,042	0,053
Kabupaten Purbalingga	0,044	0,054	-0,077	-0,012	0,043	0,054	0,035	0,045
Kabupaten Banjarnegara	0,050	0,057	-0,107	-0,013	0,042	0,053	0,041	0,051
Kabupaten Kebumen	0,052	0,055	-0,128	-0,015	0,044	0,058	0,040	0,053
Kabupaten Purworejo	0,051	0,053	-0,085	-0,016	0,044	0,054	0,039	0,048
Kabupaten Wonosobo	0,046	0,051	-0,118	-0,016	0,037	0,050	0,033	0,046
Kabupaten Magelang	0,044	0,053	-0,027	-0,017	0,045	0,055	0,042	0,051
Kabupaten Boyolali	0,051	0,057	-0,087	-0,012	0,053	0,063	0,037	0,046
Kabupaten Klaten	0,051	0,055	-0,082	-0,012	0,052	0,059	0,044	0,051
Kabupaten Sukoharjo	0,050	0,058	-0,037	-0,017	0,045	0,056	0,040	0,050
Kabupaten Wonogiri	0,052	0,054	-0,096	-0,014	0,053	0,056	0,046	0,049
Kabupaten Karanganyar	0,051	0,060	-0,069	-0,019	0,050	0,059	0,048	0,055
Kabupaten Sragen	0,054	0,058	-0,107	-0,018	0,049	0,058	0,046	0,054
Kabupaten Grobogan	0,053	0,058	-0,070	-0,016	0,050	0,060	0,045	0,054
Kabupaten Blora	0,040	0,044	-0,070	-0,046	0,019	0,027	0,023	0,031
Kabupaten Rembang	0,051	0,059	-0,029	-0,015	0,047	0,056	0,043	0,051
Kabupaten Pati	0,051	0,057	-0,063	-0,012	0,046	0,056	0,042	0,051
Kabupaten Kudus	0,020	0,032	-0,009	-0,031	0,011	0,022	0,018	0,028
Kabupaten Jepara	0,044	0,059	0,037	-0,019	0,049	0,059	0,032	0,042
Kabupaten Demak	0,044	0,054	-0,038	-0,002	0,041	0,053	0,040	0,051
Kabupaten Semarang	0,043	0,057	-0,029	-0,027	0,044	0,053	0,039	0,047
Kabupaten Temanggung	0,042	0,051	-0,046	-0,021	0,043	0,052	0,042	0,050
Kabupaten Kendal	0,050	0,058	-0,063	-0,015	0,044	0,057	0,042	0,054
Kabupaten Batang	0,048	0,057	-0,056	-0,013	0,047	0,060	0,048	0,060
Kabupaten Pekalongan	0,051	0,058	-0,093	-0,019	0,038	0,051	0,038	0,050
Kabupaten Pemalang	0,054	0,057	-0,122	-0,006	0,038	0,051	0,039	0,051
Kabupaten Tegal	0,053	0,055	-0,114	-0,015	0,038	0,051	0,038	0,051
Kabupaten Brebes	0,049	0,053	-0,093	-0,005	0,042	0,055	0,039	0,050
Kota Magelang	0,051	0,055	-0,024	-0,024	0,055	0,058	0,053	0,056
Kota Surakarta	0,054	0,057	-0,028	-0,018	0,060	0,063	0,054	0,056
Kota Salatiga	0,044	0,058	-0,010	-0,017	0,042	0,055	0,041	0,054
Kota Semarang	0,048	0,065	0,073	-0,019	0,048	0,057	0,048	0,056
Kota Pekalongan	0,048	0,057	-0,023	-0,019	0,045	0,058	0,042	0,053
Kota Tegal	0,055	0,059	-0,111	-0,023	0,039	0,052	0,041	0,052
JATENG	0,045	0,053	-0,055	-0,026	0,043	0,053	0,040	0,048

Tabel 2. Perbandingan Koefisien Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi dalam Menurunkan Ketimpangan dengan Pertumbuhan Ekonomi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2024

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2018		2020		2022		2024	
	IGin	Gg	IGin	Gg	IGin	Gg	IGin	Gg
Kabupaten Cilacap	0,025	0,030	-0,205	-0,103	0,041	0,051	0,017	0,027
Kabupaten Banyumas	0,055	0,065	NA	-0,017	0,048	0,059	0,042	0,053
Kabupaten Purbalingga	0,044	0,054	-0,077	-0,012	0,043	0,054	0,035	0,045
Kabupaten Banjarnegara	NA	0,057	NA	-0,013	0,043	0,053	0,041	0,051
Kabupaten Kebumen	NA	0,055	NA	-0,015	0,044	0,058	0,040	0,053
Kabupaten Purworejo	NA	0,053	NA	-0,016	0,044	0,054	0,039	0,048
Kabupaten Wonosobo	0,046	0,051	-0,118	-0,016	0,037	0,050	0,033	0,046
Kabupaten Magelang	0,044	0,053	-0,027	-0,017	0,045	0,055	0,042	0,051
Kabupaten Boyolali	0,051	0,057	-0,087	-0,012	0,053	0,063	0,037	0,046
Kabupaten Klaten	NA	0,055	NA	-0,012	0,052	0,059	0,044	0,051
Kabupaten Sukoharjo	NA	0,058	NA	-0,017	0,045	0,056	0,040	0,050
Kabupaten Wonogiri	0,052	0,054	-0,096	-0,014	0,053	0,056	0,046	0,049
Kabupaten Karanganyar	0,051	0,060	-0,069	-0,019	0,050	0,059	0,048	0,055
Kabupaten Sragen	NA	0,058	NA	-0,018	0,049	0,058	0,046	0,054
Kabupaten Grobogan	NA	0,058	NA	-0,016	0,050	0,060	0,045	0,054
Kabupaten Blora	0,040	0,044	-0,070	-0,046	0,019	0,027	0,023	0,031
Kabupaten Rembang	NA	0,059	-0,029	-0,015	0,047	0,056	0,043	0,051
Kabupaten Pati	NA	0,057	NA	-0,012	0,046	0,056	0,042	0,051
Kabupaten Kudus	NA	0,032	NA	-0,031	0,011	0,022	0,018	0,028
Kabupaten Jepara	NA	0,059	NA	-0,019	0,049	0,059	0,032	0,042
Kabupaten Demak	NA	0,054	-0,038	-0,002	0,041	0,053	0,040	0,051
Kabupaten Semarang	NA	0,057	NA	-0,027	0,044	0,053	0,039	0,047
Kabupaten Temanggung	NA	0,051	NA	-0,021	0,043	0,052	0,042	0,050
Kabupaten Kendal	0,050	0,058	-0,063	-0,015	0,044	0,057	0,042	0,054
Kabupaten Batang	NA	0,057	NA	-0,013	0,047	0,060	0,048	0,060
Kabupaten Pekalongan	NA	0,058	NA	-0,019	0,038	0,051	0,038	0,050
Kabupaten Pemalang	NA	0,057	NA	-0,006	0,038	0,051	0,039	0,051
Kabupaten Tegal	0,053	0,055	-0,114	-0,015	0,038	0,051	0,038	0,051
Kabupaten Brebes	NA	0,053	NA	-0,005	0,042	0,055	0,039	0,050
Kota Magelang	0,051	0,055	-0,024	-0,024	0,055	0,058	0,053	0,056
Kota Surakarta	NA	0,057	-0,028	-0,018	0,060	0,063	0,054	0,056
Kota Salatiga	0,044	0,058	-0,010	-0,017	0,042	0,055	0,041	0,054
Kota Semarang	NA	0,065	NA	-0,019	0,048	0,057	0,048	0,056
Kota Pekalongan	NA	0,057	-0,023	-0,019	0,045	0,058	0,042	0,053
Kota Tegal	NA	0,059	NA	-0,023	0,039	0,052	0,041	0,052
JATENG					0,043	0,053	0,040	0,048

Tabel 3. Perbandingan Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi dalam Penyerapan Tenaga Kerja dengan Pertumbuhan Ekonomi pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2018-2024

Kabupaten/Kota	Tahun							
	2018		2020		2022		2024	
	IGem	Gg	IGem	Gg	IGem	Gg	IGem	Gg
Kabupaten Cilacap	-0,040	0,030	0,045	-0,103	0,051	0,051	0,032	0,027
Kabupaten Banyumas	0,059	0,065	0,001	-0,017	0,005	0,059	0,066	0,053
Kabupaten Purbalingga	0,005	0,054	0,039	-0,012	0,069	0,054	0,026	0,045
Kabupaten Banjarnegara	0,031	0,057	0,003	-0,013	0,042	0,053	0,036	0,051
Kabupaten Kebumen	-0,004	0,055	0,019	-0,015	0,062	0,058	0,052	0,053
Kabupaten Purworejo	0,049	0,053	0,054	-0,016	-0,008	0,054	-0,004	0,048
Kabupaten Wonosobo	0,016	0,051	-0,004	-0,016	0,060	0,050	0,032	0,046
Kabupaten Magelang	-0,023	0,053	0,037	-0,017	0,061	0,055	-0,012	0,051
Kabupaten Boyolali	0,049	0,057	0,042	-0,012	0,004	0,063	0,018	0,046
Kabupaten Klaten	0,015	0,055	-0,005	-0,012	0,032	0,059	0,123	0,051
Kabupaten Sukoharjo	0,034	0,058	0,014	-0,017	-0,011	0,056	0,021	0,050
Kabupaten Wonogiri	0,066	0,054	0,075	-0,014	0,029	0,056	-0,053	0,049
Kabupaten Karanganyar	0,021	0,060	0,060	-0,019	-0,023	0,059	0,066	0,055
Kabupaten Sragen	-0,044	0,058	0,017	-0,018	-0,028	0,058	0,098	0,054
Kabupaten Grobogan	-0,004	0,058	0,015	-0,016	-0,005	0,060	0,020	0,054
Kabupaten Blora	0,052	0,044	0,056	-0,046	0,070	0,027	-0,050	0,031
Kabupaten Rembang	-0,028	0,059	-0,007	-0,015	0,056	0,056	0,033	0,051
Kabupaten Pati	0,013	0,057	-0,026	-0,012	0,044	0,056	0,061	0,051
Kabupaten Kudus	0,030	0,032	0,048	-0,031	-0,038	0,022	0,059	0,028
Kabupaten Jepara	0,014	0,059	0,039	-0,019	0,019	0,059	0,018	0,042
Kabupaten Demak	0,069	0,054	0,043	-0,002	0,023	0,053	0,035	0,051
Kabupaten Semarang	-0,030	0,057	0,020	-0,027	0,032	0,053	0,053	0,047
Kabupaten Temanggung	0,014	0,051	-0,221	-0,021	0,039	0,052	0,041	0,050
Kabupaten Kendal	0,014	0,058	0,048	-0,015	0,060	0,057	0,012	0,054
Kabupaten Batang	0,057	0,057	0,026	-0,013	0,059	0,060	0,030	0,060
Kabupaten Pekalongan	0,013	0,058	0,010	-0,019	-0,006	0,051	0,098	0,050
Kabupaten Pemalang	0,009	0,057	-0,005	-0,006	0,066	0,051	0,053	0,051
Kabupaten Tegal	-0,001	0,055	0,006	-0,015	-0,006	0,051	0,103	0,051
Kabupaten Brebes	0,011	0,053	0,015	-0,005	0,038	0,055	0,102	0,050
Kota Magelang	0,066	0,055	0,046	-0,024	0,011	0,058	-0,023	0,056
Kota Surakarta	0,010	0,057	-0,001	-0,018	0,023	0,063	-0,020	0,056
Kota Salatiga	0,045	0,058	0,065	-0,017	0,024	0,055	-0,006	0,054
Kota Semarang	-0,033	0,065	0,064	-0,019	0,040	0,057	0,019	0,056
Kota Pekalongan	0,035	0,057	-0,073	-0,019	-0,062	0,058	0,042	0,053
Kota Tegal	0,001	0,059	-0,067	-0,023	0,010	0,052	0,058	0,052
JATENG	0,012	0,053	0,018	-0,026	0,027	0,053	0,040	0,048

Tabel 4. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang Memiliki Pertumbuhan Inklusif 2018-2024

Indikator inklusivitas	Tahun			
	2018	2020	2022	2024
Menurunkan kemiskinan	Tidak ada	2 daerah inklusif, yaitu: - Kab. Jepara - Kota Semarang	Tidak ada	Tidak ada
Mengurangi ketimpangan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Menyerap tenaga kerja	4 daerah inklusif, yaitu kabupaten: - Wonogiri - Blora - Demak - Magelang	Semua inklusif, kecuali, 5 daerah yaitu Kabupaten: - Wonosobo - Klaten - Rembang - Pati, - Temanggung - Pemalang, dan - Kota Surakarta	6 daerah inklusif, yaitu Kabupaten: - Purbalingga - Kebumen, - Wonosobo - Magelang, - Blora - Pemalang	12 daerah inklusif, yaitu Kabupaten: - Cilacap - Banyumas - Klaten - Karanganyar - Sragen - Pati - Kudus - Pekalongan - Pemalang - Tegal - Brebes, dan - Kota Tegal

Kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan inklusif berdasarkan tiga indikator tersebut, ditunjukkan oleh angka yang dicetak tebal (indikator), dan secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 4.

Berdasarkan data pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2018-2024, pertumbuhan ekonomi inklusif yang menurunkan kemiskinan hanya terjadi di tahun 2020, di dua daerah kabupaten. Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengurangi ketimpangan selama periode penelitian. Sedangkan inklusivitas dalam menyerap tenaga kerja setiap tahun selalu ada daerah yang berkontribusi, dan tertinggi pada tahun 2020.

Dari ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah baru bisa menyerap tenaga kerja yang berupa rendah, sehingga kurang bisa menurunkan kemiskinan dan tetap mempertahankan kesenjangan. Seperti pada tahun 2020, di mana sebanyak 34 daerah memiliki nilai koefisien inklusivitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (IGp) yang bernilai negatif. Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada cenderung memperparah terjadinya kemiskinan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Jawa Tengah

Model penduga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dibedakan antara: (1) inklusif dalam menurunkan kemiskinan (IGp), (2) inklusif dalam mengurangi ketimpangan (IGin) dan (3) inklusif dalam menyerap tenaga kerja (IGem).

Dalam estimasi model panel menggunakan GMM dilakukan terlebih dahulu uji Arellano-Bond sebagai bentuk pengujian spesifikasi model dinamis yang wajib sebelum melanjutkan ke tahap analisis lanjutan. Setelah estimasi dilakukan dengan pendekatan First Difference GMM (FD-GMM), validitas instrumen diuji melalui uji Sargan sedangkan konsistensi instrumen dinilai menggunakan uji Arellano-Bond. Uji Sargan diterapkan untuk menguji validitas keseluruhan instrumen, terutama dalam kondisi over identifikasi yaitu ketika jumlah instrumen melebihi jumlah parameter yang diestimasi. Dalam penelitian ini, hipotesis nol pada Uji Sargan menyatakan bahwa instrumen yang digunakan valid.

Tabel 5. Hasil uji Arellano Bond (AB)

Test Order	m-statistic	Rho	SE (rho)	Prob.
AR (1)	-2,2327	-16984664,2152	7607190,2282	0,0256
AR (2)	-0,4180	-1498968,8745	3585349,7544	0,6759

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah residual dari estimasi GMM menunjukkan sifat homoskedastisitas, sekaligus menguji validitas instrumen yang digunakan. Uji Arellano-Bond secara khusus ditujukan untuk memastikan bahwa error term tidak mengalami autokorelasi pada orde kedua AR (2). Hal ini penting untuk menjamin keabsahan estimasi yang mendukung hipotesis nol bahwa tidak terdapat autokorelasi serial. Karena uji AR (2) mendeteksi autokorelasi pada tingkat level, hasilnya menjadi lebih krusial untuk menilai keandalan model.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam Mengurangi Kemiskinan

Dalam pendekatan model panel GMM, pengujian konsistensi diperlukan untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi asumsi dasar yaitu salah satunya melalui uji autokorelasi sebagaimana dikemukakan oleh Arellano dan Bond (1991). Model dinyatakan konsisten apabila tidak terdapat autokorelasi residual pada orde kedua AR (2). Dengan demikian, hasil uji AR (2) seharusnya tidak signifikan yang ditunjukkan oleh nilai p-value yang lebih besar dari 0,05.

Pada Tabel 4 hasil estimasi model bersifat konsisten karena nilai prob AR (2) sebesar 0,6759 > 5%.

Validitas instrumen dalam model panel FD-GMM ini diuji menggunakan Uji Sargan. Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah jumlah instrumen yang digunakan melebihi jumlah parameter yang diestimasi atau dikenal sebagai kondisi overidentifying restrictions (Dahlberg et al., 2002). Berdasarkan hasil pada Tabel 4, diperoleh nilai probabilitas (J-statistic) sebesar 0,0857. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam model ini memenuhi syarat validitas.

Sementara itu faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 5. Variabel Belanja Daerah (BLJ) berpengaruh signifikan dan positif terhadap koefisien inklusivitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan. Koefisien variabel positif dan signifikan menunjukkan bahwa belanja daerah yang semakin tinggi akan meningkatkan koefisien inklusivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa belanja daerah akan meningkatkan inklusivitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan. Belanja pemerintah yang diarahkan ke kelompok bawah lebih efektif dalam menurunkan kemiskinan dan mendorong inklusivitas (Fosu 2010).

Tabel 6. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

<i>Variabel</i>	<i>Koefisien</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>IGP(-1)</i>	-0,5488	0,0542	-10,1222	0,0000
<i>LOG(PDP)</i>	-1506,589	362,9959	-4,1504	0,0001
<i>LOG(BLJ)</i>	134,8888	12,4576	10,8277	0,0000
<i>LOG(APS)</i>	-487,1652	107,8702	-4,5162	0,0000
<i>Mean dependent var</i>	-6,6352	<i>S.D. dependent var</i>	746,0359	
<i>S.E. of regression</i>	724,6663	<i>Sum squared resid</i>	81396893	
<i>J-statistic</i>	17,8242	<i>Instrument rank</i>	15	
<i>Prob(J-statistic)</i>	0,0857			

Tabel 7. Hasil uji pemilihan model terbaik

Uji Model Terbaik	Nilai Probabilitas	Hasil
Uji Chow	0,0000	Tolak H ₀ , FEM
Uji Hausman	0,0019	Tolak H ₀ , FEM

Sumber: Hasil olah data E-views

Variabel inklusivitas pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (IGP(-1)) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap koefisien inklusivitas pertumbuhan pada tahun berjalan. Hal ini menandakan adanya proses penyesuaian dinamis (dynamic adjustment) di mana capaian inklusivitas tinggi pada periode sebelumnya menyebabkan perlambatan pertumbuhan inklusif di periode selanjutnya. Hasil ini sesuai dengan Anand et al. (2013) yang menekankan bahwa pertumbuhan inklusif bersifat path-dependent namun dapat mengalami koreksi dinamis dalam jangka pendek.

Variabel PDRB per kapita (PDP) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap koefisien inklusivitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan PDRB belum bersifat merata di mana hanya dinikmati oleh kelompok atas sehingga tidak menghasilkan *trickle-down effect*.

Dalam konteks ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu inklusif apabila tidak disertai dengan pemerataan akses terhadap kesempatan ekonomi dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan Fosu (2010) yang menyatakan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat menghambat efektivitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan.

Variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap koefisien inklusivitas pertumbuhan dalam menurunkan kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya kesenjangan antara peningkatan partisipasi sekolah dengan kualitas pendidikan, di mana sistem pendidikan belum mampu menciptakan mobilitas sosial. Selain itu, APS yang tinggi bisa juga terjadi di daerah-daerah yang sudah maju tanpa diiringi dengan pengurangan kesenjangan wilayah sehingga dampaknya terhadap inklusivitas pertumbuhan terbatas.

Hal ini sejalan dengan penelitian Putri dan Prasetyo (2021) yang menyatakan bahwa APS berpengaruh signifikan hanya dalam jangka panjang dan di daerah dengan mutu pendidikan yang baik. Di daerah lain, tingginya APS justru tidak berkontribusi nyata terhadap pengurangan kemiskinan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam menurunkan ketimpangan

Agar mendapatkan model yang paling sesuai, dilakukan uji kesesuaian model dalam dua tahap yaitu uji Chow dan uji Hausman. Berdasarkan hasil uji Chow, probabilitas yang diperoleh sebesar 0,0000 berada di bawah tingkat signifikansi 5% (0,05), yang berarti hipotesis nol ditolak, sehingga model yang sesuai adalah Fixed Effect Model. Selanjutnya, berdasarkan uji Hausman diperoleh nilai probabilitas yang lebih kecil dari 5% (0,05) yaitu 0,0019, yang berarti hipotesis nol ditolak, sehingga Fixed Effect Model dipilih sebagai model yang digunakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka metode paling sesuai yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Berikut ini Tabel 6 yang menunjukkan hasil pengujian pemilihan model terbaik.

Untuk mengantisipasi adanya heteroskedastisitas dan autokorelasi pada model, maka diregresi dengan metode GLS menggunakan white periode robust standard error. Dengan demikian hasil estimasi telah bebas dari masalah heteroskedastisitas dan kebal terhadap masalah serial correlation. Sedangkan untuk uji multikolinearitas tidak dilakukan karena penggunaan data panel dapat mengabaikan pelanggaran asumsi multikolinearitas, karena adanya penggabungan time series dan cross section, sehingga akan lebih banyak variasi data dan lebih sedikitnya korelasi antar variabel. Selain itu, indikasi adanya multikolinearitas atau korelasi antar variabel pada sebuah model adalah jika dalam

uji-F disimpulkan signifikan dan R-squared yang tinggi namun sebagian besar nilai t statistik tidak signifikan. Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa model faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan memiliki koefisien determinasi (R²) sebesar 0,94. Artinya, variabel bebas dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan sebanyak 94% variasi variabel terikat dan sisanya yaitu 6% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa uji-F signifikan pada taraf nyata 5% (0,05), karena nilai probabilitas F-stat sama dengan 0,000 yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05. Hal ini berarti variabel-variabel bebas dalam model secara bersama-sama memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan yang inklusif terhadap penurunan ketimpangan.

Hasil estimasi pada Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel bebas yang signifikan pada taraf nyata 1 %. Variabel tersebut adalah investasi (INV), pendapatan per kapita (PDP) dan angka partisipasi sekolah (APS).

Variabel investasi (INV) memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks inklusivitas pertumbuhan dalam menurunkan ketimpangan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa investasi terpusat pada sektor atau wilayah tertentu maka pertumbuhan yang dihasilkan cenderung memperlebar ketimpangan. Oleh karena itu investasi perlu diarahkan agar bersifat inklusif yang menyasar pada daerah tertinggal

atau sektor padat karya. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasanah (2023) yang menemukan bahwa investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inklusivitas karena tidak merata di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat.

Variabel pendapatan per kapita (PDP) memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks inklusivitas pertumbuhan dalam menurunkan ketimpangan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan PDRB belum bersifat merata di mana hanya dinikmati oleh kelompok atas sehingga tidak menghasilkan *trickle-down effect*. Dalam konteks ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu inklusif apabila tidak disertai dengan pemerataan akses terhadap kesempatan ekonomi dan pelayanan publik. Selain itu, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ekstrem dapat mengurangi akses kelompok berpenghasilan rendah terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan peluang ekonomi, sehingga menurunkan produktivitas tenaga kerja. Ketimpangan yang tinggi juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik yang merusak iklim investasi dan menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan pendapatan menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

Tabel 8. Hasil estimasi model analisis faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan ketimpangan dengan Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INV	-0,0043***	0,0006	-7,2238	0,0000
PDP	-0,0605***	0,0170	-3,5484	0,0007
APS	-0,0129***	0,0007	-17,1096	0,0000
C	603,9517	32,9342	18,3381	0,0000
Weighted statistics				
R-squared	0,9430		Sum square resid	155726,9
Adjusted R-squared	0,9115		Durbin-Watson stat	3,0248
Prob (F-statistic)	0,0000			
Unweighted statistics				
R-squared	0,7934		Durbin-Watson stat	2,5628
Sum square resid	175201,9			

Sumber: Hasil olah data

Keterangan: ***signifikan pada taraf nyata 1%

Tabel 9. Hasil uji Arellano Bond (AB)

Test Order	m-statistic	Rho	SE (rho)	Prob.
AR (1)	-1,9818	-12781965,5279	6449488,9580	0,0475
AR (2)	-1,1922	-5928721,8539	4972640,4946	0,2332

Variabel angka partisipasi sekolah (APS) memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks inklusivitas pertumbuhan dalam menurunkan ketimpangan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa meskipun APS meningkat, kualitas pendidikan belum tentu baik, terutama di daerah tertinggal. Banyaknya jumlah penduduk yang sekolah belum tentu diiringi dengan kualitas pendidikan yang baik atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, APS yang tinggi bisa saja didominasi oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, sementara kelompok miskin masih sulit mengakses pendidikan bermutu. Hal ini sejalan dengan penelitian Liyana (2023) yang menekankan bahwa ketidakmerataan pendidikan meskipun APS tinggi bisa jadi akan melemahkan pertumbuhan inklusif dan memperlebar ketimpangan ekonomi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dalam Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Model dinyatakan konsisten apabila tidak terdapat autokorelasi residual pada orde kedua AR(2). Dengan demikian, hasil uji AR(2) seharusnya tidak signifikan yang ditunjukkan oleh nilai p-value yang lebih besar dari 0,05. Pada Tabel 8 hasil estimasi model bersifat

konsisten karena nilai prob AR(2) sebesar $0,2332 > 5\%$.

Berdasarkan hasil Uji Sargan pada Tabel 8, diperoleh nilai probabilitas (J-statistic) sebesar 0,1976. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam model ini memenuhi syarat validitas.

Sementara itu faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 9.

Variabel inklusivitas pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya ($IGE(-1)$) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap koefisien inklusivitas pertumbuhan pada tahun berjalan. Hal ini menandakan adanya proses penyesuaian dinamis (dynamic adjustment) di mana capaian inklusivitas tinggi pada periode sebelumnya menyebabkan perlambatan pertumbuhan inklusif di periode selanjutnya. Hasil ini sesuai dengan Anand et al. (2013) yang menekankan bahwa pertumbuhan inklusif bersifat path-dependent namun dapat mengalami koreksi dinamis dalam jangka pendek. Variabel UPAH berpengaruh signifikan dan negatif terhadap koefisien inklusivitas pertumbuhan dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 10. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah

<i>Variabel</i>	<i>Koefisien</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>IGEM(-1)</i>	-0,4756	0,1114	-4,2696	0,0000
<i>LOG(UPAH)</i>	-7508,555	2181,967	-3,4411	0,0008
<i>LOG(PDRB)</i>	10397,12	2480,157	4,1921	0,0000
<i>LOG(UNEM)</i>	1697,014	569,7227	2,9786	0,0034
<i>Mean dependent var</i>	33,29221		<i>S.D. dependent var</i>	763,1961
<i>S.E. of regression</i>	711,8434		<i>Sum squared resid</i>	76008144
<i>J-statistic</i>	14,67948		<i>Instrument rank</i>	15
<i>Prob(J-statistic)</i>	0,197646			

Keterangan: *signifikan pada taraf nyata 1%

Hal ini berarti bahwa ketika upah meningkat, koefisien inklusivitas pertumbuhan terhadap penyerapan tenaga kerja turun. Untuk dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, pertumbuhan membutuhkan ekspansi pada sektor-sektor ekonominya sehingga kesempatan kerja dapat tercipta lebih banyak dan mampu menampung angkatan kerja yang lebih besar. Jika tingkat upah meningkat, maka akan semakin sulit bagi sektor usaha untuk meningkatkan tenaga kerjanya karena biaya upah semakin besar. Akibatnya, sektor usaha akan cenderung mengurangi tenaga kerja yang ada atau mensubstitusinya dengan faktor produksi yang lain, sehingga kesempatan kerja akan berkurang. Ketika kesempatan kerja menurun, inklusivitas pertumbuhan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja juga akan turun. Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Mardiyah. (2017) yang menyatakan bahwa upah minimum yang terlalu tinggi berpengaruh negatif terhadap penciptaan lapangan kerja dan berisiko menurunkan efisiensi pasar tenaga kerja.

Variabel PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap koefisien inklusivitas pertumbuhan dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka koefisien inklusivitas pertumbuhan terhadap penyerapan tenaga kerja akan semakin meningkat secara signifikan. Dapat dikatakan juga bahwa, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi mendorong pertumbuhan semakin inklusif dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Nugroho dan Fitriani. (2019) yang menekankan bahwa PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi inklusivitas sangat tergantung pada distribusi PDRB antar wilayah dan sektor

Variabel UNEM berpengaruh signifikan dan positif terhadap koefisien inklusivitas pertumbuhan dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dijelaskan bahwa inklusivitas pertumbuhan yang meningkat tidak hanya menguntungkan kelompok bekerja, tapi juga yang menganggur, sebagaimana pendapat Ali dan Zhuang (2007) bahwa inklusivitas pertumbuhan dapat terjadi ketika kelompok miskin dan penganggur ikut menikmati hasil pertumbuhan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah cenderung tidak inklusif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, dan inklusif dalam penyerapan tenaga kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam menurunkan kemiskinan adalah inklusivitas pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, pendapatan per kapita, angka partisipasi sekolah dan investasi; yang memengaruhi inklusivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan ketimpangan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti investasi, pendapatan per kapita dan angka partisipasi sekolah, dan yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif dalam penyerapan tenaga kerja adalah inklusivitas pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, tingkat upah, PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Dari tiga indikator inklusivitas, pertumbuhan ekonomi belum bisa menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, di mana kedua indikator inklusivitas tersebut dipengaruhi oleh variabel investasi dan partisipasi sekolah. Oleh karena itu investasi pada sektor-sektor yang labor intensive masih diperlukan. Investasi tersebut perlu dibarengi dengan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia (SDM), melalui peningkatan kesempatan belajar pada sekolah kejuruan agar SDM memiliki kemampuan beradaptasi pada era gig ekonomi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan H, Iqbal Z, Azra, Shabeer MG. 2024. Developing an inclusive growth index: Socio-economic determinants and macroeconomic perspectives for Pakistan. *Journal of Contemporary Macroeconomic Issues*. 5(1):107–125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12528041>
- Ali I, Zhuang J. 2007. Inclusive Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications. ERD Working Paper Series No. 97.
- Anand R, Mishra S, Peiris SJ. 2013. Inclusive Growth: Measurement and Determinants. IMF Working Paper No. 13/135.
- Bappenas. 2020. Pembangunan Ekonomi Inklusif. Available from:

- <http://inklusif.bappenas.go.id/indeks#pembangunanEkonomi>
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2024. Statistik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Semarang (ID): BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Bustinza HA, Garcia WF, Contreras VC, Cobenas DP, Moscoso MB, Ponco VZ. 2023. Determinants of inclusive economic growth in Latin America. *WSEAS Transactions on Business and Economics*. 20:1059–1073. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.9>
- Cahyadi NMAK, Sasongko S, Saputra PMA. 2018. Inclusive growth and leading sector in Bali. *Economic Journal of Emerging Markets*. 10(1):99–110.
- Dahlberg M, Johansson E, Tovmo P. 2002. Power Properties of the Sargan Test in the Presence of Measurement Errors in Dynamic Panels. Working Paper.
- Fosu AK. 2010. Does inequality constrain poverty reduction programs? Evidence from Africa. *Journal of Policy Modeling*. 32(6):818–827.
- Habeenzu LJ. 2024. Determinants of inclusive growth in Zambia. *African Journal of Economic Review*. 12(1):39–54.
- Hapsari WR. 2019. Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*. 3(1). <https://doi.org/10.32630/Sukowati.V3i1.121>
- Hasanah N. 2023. Pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antarprovinsi di Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi STIEP*. 8(2).
- Hidayat I. 2019. Faktor-faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Klasen S. 2010. Measuring and Monitoring Inclusive Growth: Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals.
- Lestari ED, Mardiyah N. 2017. Pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap kesempatan kerja. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Liyana NF. 2023. The effect of educational inequality on economic growth in Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*. 5(1):14–153.
- Nugroho H, Fitriani D. 2019. Pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia: Analisis pengaruh PDRB dan ketimpangan terhadap penyerapan tenaga kerja. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 20(2).
- Oluseye IC, Aremo AG. 2017. Determinants of inclusive growth in Nigeria: An ARDL approach. *American Journal of Economics*. Available from: <http://article.sapub.org/10.5923.j.economics.20170703.01>
- Prabandari DAN, Santoso DB. 2018. Analisis inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 7(1).
- Prasetyantoko A, Budiantoro S, Bahagijo S. 2012. *Pembangunan Inklusif: Prospek dan Tantangan Indonesia*. Jakarta (ID): LP3ES-Prakarsa.
- Putri RE, Prasetyo E. 2021. Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan dan kemiskinan: Pendekatan panel data provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 14(3):190–202.
- Sajid A, Ali A. 2018. Inclusive growth and macroeconomic situations in South Asia: An empirical analysis. *Bulletin of Business and Economics*. 7(3):97–109.
- Sholihah DHA, Hutagaol MP, Asmara A. 2018. Pertumbuhan inklusif: Fenomena pertumbuhan inklusif di kawasan Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. 2(2):85–112. <https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.85-112>
- Sitorus YAV, Marsinta AA. 2016. Komparasi pertumbuhan ekonomi inklusif di 33 provinsi Indonesia tahun 2010–2015: Studi kasus menggunakan metode pendekatan ADB, WEF, dan UNDP. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*. 23(2):64–77.
- Hartati YS. 2021. Analisis pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan*

- Bisnis. 12(1).
<https://doi.org/10.55049/Jeb.V12i1.74>
- Zulfia B, Dwiputri IN, Isupova E. 2024. An examination of inclusive economic growth and its factors: A case study of East Java, Indonesia. R-economy Journal. 10(3):350–368.
<https://doi.org/10.15826/recon.2024.10.3.022>